



## **Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Pengembangan Obyek Wisata Tanjung Malaha di Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara**

**Abdul Sabaruddin<sup>1</sup>, Robin Adnan<sup>2</sup>, Maulid<sup>3</sup>**

<sup>1, 2, 3</sup>Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia

<sup>1</sup>abdulsabaruddin@usn.ac.id

<sup>2</sup>robinadnan@gmail.com

<sup>3</sup>romanlaode@ymail.com

### **Abstrak**

Pariwisata merupakan sektor penting yang memiliki peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Sektor pariwisata berperan pada peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Untuk memaksimalkan potensi tersebut, kolaborasi pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam pengembangan objek wisata. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode interaktif yang meliputi kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan dalam pengembangan obyek wisata tanjung Malaha, komunikasi yang menjadi aspek penting dalam kolaborasi, karena komunikasi yang terbuka dapat memberikan akses informasi mengenai kebutuhan dalam pembangunan obyek wisata. Namun aspek ini, masih kurang efektif sehingga berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah pembangunan obyek wisata. Kondisi ini juga menyebabkan terjadinya perbedaan pandangan diantara kelompok sadar wisata (Pokdarwis) tentang pemahaman pengelolaan obyek wisata

**Kata Kunci:** Kolaborasi, Obyek Wisata, Stakeholder.

### **Abstract**

*Tourism is an important sector that has a role in driving economic growth and regional development. The tourism sector plays a role in increasing regional income and community welfare. To optimize this potential, the collaborative government and community are the primary keys in the development of tourism objects. This research is qualitative descriptive research with data collection carried out through interview and documentation techniques. Research informants used purposive sampling techniques. The results of the interviews and documentation were then analyzed using interactive methods which included data condensation, data presentation and drawing conclusions. The research results show that in developing the Tanjung Malaha tourist attraction, communication is an important aspect of collaboration because open communication can provide access to information regarding needs in developing the tourist attraction.*

*However, this aspect is still less effective so it has an impact on the level of community participation in deliberation activities for the development of tourist attractions. This condition also causes differences in views among tourism awareness groups (Pokdarwis) regarding understanding the management of tourist attractions.*

**Keywords:** *Collaboration, Stakeholders, Tourism Object.*

## 1. Pendahuluan

Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor ekonomi yang berkembang pesat di berbagai negara di dunia. Pengembangan objek wisata yang menarik dan berkelanjutan berperan penting dalam meningkatkan pendapatan nasional, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong terjadinya pertukaran budaya. Seperti yang disampaikan Triana Wahyudi (2021) sektor pariwisata memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi, selain menciptakan lapangan kerja, terutama bagi pelaku usaha di bidang pariwisata.

Namun, untuk mencapai keberhasilan yang berkelanjutan dalam pengembangan pariwisata, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting. Araujo & Bramwell, (2002) berpendapat bahwa dalam pengembangan pariwisata diperlukan kemitraan sehingga terwujud kerja sama dan koordinasi dalam merencanakan program pariwisata baik secara nasional, regional, maupun lokal (Pujiyono, 2022). Tiga unsur utama dalam membangun kolaborasi di bidang pariwisata yaitu daya tarik wisata, atraksi wisata, dan keterlibatan aktor pariwisata (Pujiyono, 2022).

Pelibatan stakeholder dalam pengembangan pariwisata menjadi penting dalam mengatasi keterbatasan sumberdaya yang dimiliki masing-masing aktor. Karena itu, kolaborasi merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan dalam pengembangan obyek wisata (Sabaruddin et al. 2023). Dalam pandangan Imperial (2004) kolaborasi merupakan proses interaksi antar aktor melalui pembagian peran, aturan dan kewenangan untuk memecahkan masalah berdasarkan kesepakatan bersama melalui pembagian sumberdaya seperti informasi, dana atau sumberdaya manusia (D. S. A. Sabaruddin, 2017).

Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi merupakan bentuk metode dan strategi yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama antar pihak dalam proses pengambilan keputusan. Kolaborasi membantu pemahaman kerja tim untuk berkontribusi merespon masalah-masalah publik yang tidak bisa diselesaikan secara sendiri, salah satunya, permasalahan sektor swasta. Kabupaten Kolaka merupakan salah satu wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki potensi alam, budaya, dan sejarah yang menarik dan memiliki peluang besar untuk mengembangkan objek wisata yang berkelanjutan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain sungai Tamborasi, sungai terpendek di dunia dengan panjang 20 meter dan lebar 15 meter, Kabupaten Kolaka juga memiliki destinasi obyek wisata Tanjung Malah di Desa Malaha Kecamatan Samaturu. Destinasi ini sekaligus menjadikan Malaha sebagai satu-satunya desa di Sultra yang memiliki wisata tanjung.

Namun, destinasi obyek wisata ini memiliki infrastruktur yang kurang memadai sehingga berdampak pada minat wisatawan untuk berkunjung. Untuk mengatasi kondisi ini, pemerintah daerah mengembangkan pendekatan kolaborasi untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi pariwisata. Kolaborasi ini memiliki peran penting dalam merumuskan strategi pengembangan

pariwisata yang berkelanjutan, merancang berbagai produk wisata, serta mempromosikan Kabupaten Kolaka sebagai destinasi wisata yang menarik. Tetapi kolaborasi pemerintah dan masyarakat tersebut tidak dilakukan secara formal, berbeda dengan kolaborasi stakeholder lainnya yang dilakukan melalui perjanjian formal (perjanjian kerjasama) antara pihak. Kondisi ini berdampak pada keberlanjutan program pengembangan obyek wisata karena pihak-pihak yang berkolaborasi memiliki sumber daya yang terbatas.

Kondisi ini berbeda dengan penelitian Khopifatu S et al., (2023) yang mengkaji pola kolaborasi dalam pengelolaan wana wisata gunung galunggung di Kabupaten Tasikmalaya. Kolaborasi pengelolaan wana wisata berlangsung secara formal melalui perjanjian kerjasama (PKS). Meski dilakukan secara formal tetapi kesepakatan dalam perjanjian belum terlaksana meskipun proses kolaborasi menunjukkan hasil yang cukup baik. Kondisi ini disebabkan karena ketidakpahaman atas hak dan kewajiban pihak yang berkolaborasi. Begitupun penelitian Yeli Amelia Angelina & Adianto Adianto, (2023) yang mengkaji kolaborasi dalam implementasi program pengembangan destinasi pariwisata (Studi Kasus Pada Wisata Danau Rusa di Kabupaten Kampar). Program pengembangan pengembangan destinasi wisata yang sudah berjalan dengan baik karena motivasi bersama yang sudah dipahami dan keterlibatan prinsip yang telah dijalankan oleh pihak yang berkolaborasi. Namun sumberdaya manusia, partisipasi masyarakat dan anggaran yang kurang menjadi faktor penghambat kolaborasi.

Berdasarkan hasil tersebut penelitian ini akan mengkaji proses kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan obyek wisata tanjung Malaha di Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka. dengan menggunakan konsep Ansell dan Gash (2007). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui proses terbentuknya kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan obyek wisata tanjung Malaha Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka. Kajian kolaborasi ini yang sangat relevan dengan disiplin administrasi publik sehingga penelitian ini diharapkan akan memberikan pengetahuan tentang bagaimana membangun kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah publik.

## 2. Tinjauan Pustaka

Kolaborasi merupakan kerja sama antar aktor, organisasi atau antar lembaga dalam mencapai tujuan yang tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri (D. S. A. Sabaruddin, 2017). Kolaborasi secara luas dipandang sebagai pendekatan terbaik untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan melakukannya secara sendiri-sendiri. Manfaat kolaborasi tersebut meliputi pemecahan masalah yang inovatif dan kreatif, meningkatkan keterlibatan dan kesetaraan antara pihak-pihak yang terlibat, mengurangi risiko, mencapai hasil yang efektif, dan melakukan lebih banyak hal dengan sumber daya yang lebih sedikit melalui pembagian sumber daya dan menghilangkan pemborosan (Stout & Keast, 2019).

Bahkan Fairuza (2017) berpendapat kolaborasi merupakan salah satu unsur penting saat ini karena melalui kolaborasi, semua pemangku kepentingan dapat bergabung dalam satu forum untuk berdiskusi, membangun kesepahaman dan komitmen bersama, serta memiliki tanggung jawab yang sama terhadap keberlanjutan pembangunan (Anisykurlillah, 2024). Dalam upaya membangun dan mengembangkan obyek wisata bukan saja menjadi peran pemerintah tetapi dibutuhkan juga peran berbagai stakeholder. Penelitian Hermansyah, et. al., (2020) wujud kolaborasi dalam pengembangan pariwisata dilihat dari pembagian masing-masing pihak. Misalnya, peran pemerintah yakni berhubungan dengan kebijakan dalam menunjang pengelolaan pariwisata. Sementara tugas masyarakat adalah membangkitkan kesadaran tentang

pentingnya kehadiran obyek wisata karena dapat melahirkan kreasi yang menjadi daya pikat parawisata.

### 3. Metodologi

Penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Menurut Creswell & Guetterman (2018) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian di mana peneliti memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap informasi dari objek atau partisipan dalam lingkup yang luas, menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum, pengumpulan data yang sebagian besar berasal dari tulisan atau perkataan partisipan, dan menjelaskan serta menganalisis tulisan yang terkumpul secara subyektif (Lestari Dewi, 2022). Pendekatan ini digunakan untuk menemukan, memahami dan mendapatkan gambaran secara jelas serta mendalam tentang kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan obyek wisata. Informan yang digunakan dalam penelitian adalah teknik *purposive sampling*. Sementara data penelitian diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang terdiri dari unsur pemerintah Kabupaten Kolaka dan Desa Malaha, pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengelola obyek wisata (Pokdarwis), dan masyarakat. Data yang diperoleh kemudian analisis menggunakan model interaktif Miles, Matthew B.; Huberman, A. Michael; Saldana, (2014). Komponen dalam analisis data tersebut meliputi kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam tahap kondensasi data, peneliti melakukan proses pemilihan, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data yang diperoleh dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dan dokumen-dokumen. Tahap penyajian data, peneliti melakukan pengorganisasian, penyatuan, dan informasi yang disimpulkan. Penarikan kesimpulan dilakukan peneliti dari awal peneliti mengumpulkan data seperti mencari pemahaman yang tidak memiliki pola, mencatat keteraturan penjelasan, dan alur sebab akibat, yang tahap akhirnya disimpulkan keseluruhan data yang diperoleh peneliti.

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### 4.1 Hasil Penelitian

Pada dasarnya, kolaborasi terjadi ketika dua orang atau lebih bekerja sama untuk menyelesaikan atau mewujudkan tujuan yang sama. Proses interaksi aktor yang terlibat dalam kolaborasi terjadi secara berulang membentuk hubungan sinergitas dalam menciptakan gagasan atau ide-ide yang baru. Kolaborasi dalam pengembangan obyek wisata tanjung Malaha bertujuan untuk menggabungkan sumber daya, pengetahuan, dan keterampilan dari pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan destinasi wisata yang menarik, berkelanjutan, dan memberikan manfaat ekonomi serta sosial.

Dari uraian di atas, maka penelitian ini akan menjawab proses kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan obyek wisata tanjung Malaha. Menurut Sabaruddin dan Lamo Said (2020) inti dari setiap model kolaborasi adalah bagaimana sebenarnya proses kolaborasi dibangun. Berdasarkan hal tersebut, maka dikemukakan hasil penelitian proses kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan obyek wisata tanjung Malaha dengan mengacu pandangan Ansell dan Gash (2007) dalam Sabaruddin dan Lamo Said (2020) sebagai berikut:

**a. Dialog Tatap Muka (*Face to Face Dialogue*)**

Dimensi ini menfokuskan pada sebuah pertanyaan tentang proses terjadinya konsensus dalam kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan obyek wisata tanjung Malaha. Dialog tata muka merupakan bentuk komunikasi yang dikembangkan untuk membangun kesamaan tindakan dalam pengembangan obyek wisata. Dialog tatap muka memungkinkan terciptanya interaksi langsung yang membantu membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan dialog tatap muka antara pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan obyek wisata tanjung Malah dilakukan dengan mekanisme musyawarah untuk membahas pembagian peran antara pemerintah dan masyarakat.

Hasil musyawarah disepakati pemerintah bertanggung jawab dalam penyediaan anggaran melalui dana desa dan memfasilitasi bantuan modal untuk penyediaan sarana dan prasarana. Fasilitas tersebut berupa gazebo sebanyak 6 unit, toilet 2 unit dan perahu 2 buah. Sedangkan masyarakat hadir sebagai motor penggerak dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana wisata, berkewajiban menjaga kebersihan, dan menyediakan perahu bagi pengunjung. Namun demikian, masyarakat kurang berperan aktif dalam pengembangan obyek wisata karena kurangnya kesadaran dan pemahaman potensi ekonomi dan manfaat lain yang dapat diperoleh dari pengembangan objek wisata. Minimnya informasi dan edukasi mengenai manfaat pariwisata menjadi penyebab utamanya.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat dijelaskan bahwa dialog tatap muka dilakukan dengan melalui forum musyawarah. Forum musyawarah menjadi sarana yang efektif untuk memastikan bahwa pengembangan objek wisata berjalan dengan baik, berkelanjutan, dan membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu dalam forum juga menetapkan pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah dan masyarakat. Dialog tata muka juga dapat memastikan bahwa penggunaan sumber daya dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan kesepakatan bersama serta memastikan bahwa semua pihak mengetahui peran dan tanggung jawab mereka dalam pengembangan objek wisata.

**b. Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)**

Membangun kepercayaan merupakan elemen penting dalam membangun kolaborasi. Kepercayaan memiliki peran penting untuk memastikan kolaborasi berjalan dengan baik dan efektif karena membangun kepercayaan adalah aspek mendasar dari proses dialog. Proses membangun kepercayaan merupakan kegiatan yang membutuhkan waktu dan komitmen tinggi. Aspek penting yang menjadi perhatian dari dimensi ini adalah komunikasi, konsistensi dan keterbukaan antar aktor. Dalam pengembangan obyek wisata tanjung Malaha, pemerintah mengembangkan komunikasi terbuka dalam membangun hubungan dengan masyarakat terkait dengan permasalahan atau hambatan dalam pembangunan obyek wisata.

Komunikasi yang terbuka pemerintah dengan masyarakat dapat memberikan akses informasi mengenai kebutuhan dalam pembangunan obyek wisata tersebut. Sehingga masyarakat ikut terlibat dalam pengambilan keputusan tentang aspek-aspek penting dalam pembangunan seperti jenis kebutuhan, waktu dan alokasi anggaran untuk penyelesaian pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian, dimensi ini menfokuskan pada kemampuan untuk menyatukan pemahaman tentang alasan dan tujuan terjadinya kolaborasi. Alasan dan tujuan berkolaborasinya pemerintah dan masyarakat didasarkan pada pertimbangan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki masing-masing aktor dalam pengembangan obyek wisata.

Temuan penelitian lainnya, hubungan saling percaya antar aktor dalam pengembangan obyek wisata tanjung Malaha digambarkan melalui kemauan untuk berperan aktif meskipun pembagian peran dan tanggungjawab tersebut tidak diatur secara tidak formal atau tidak tertulis melainkan berdasarkan kesepakatan dan kesadaran bersama. Kesepakatan tersebut mencerminkan kebutuhan dan aspirasi semua pihak yang terlibat dan menjadi dasar dalam membangun kerja sama dan mendorong partisipasi dalam pengembangan obyek wisata. Meskipun tingkat partisipasi masyarakat masih rendah disebabkan oleh sebagian masyarakat memiliki sumberdaya yang terbatas dan kurangnya pemahaman masyarakat pentingnya pengembangan obyek wisata.

### c. **Komitmen Pada Proses Kolaborasi (*Commitment to The Process*)**

Komitmen dalam konteks kolaborasi berkaitan dengan kesungguhan dan kemauan semua pihak yang terlibat untuk berkontribusi secara aktif dan bertanggung jawab dalam keberhasilan kolaborasi. Komitmen dapat memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan dan sasaran kolaborasi. Komitmen bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan dan sasaran kolaborasi.

Hasil penelitian terungkap bahwa pemerintah Kabupaten Kolaka dalam hal ini Dinas Parawisata memiliki komitmen yang kuat dalam mengembangkan obyek wisata tanjung Malaha. Hal ini dibuktikan dengan menghadirkan investor dan pendanaan untuk pengembangan obyek wisata. Salah satu perusahaan yang berkontribusi dalam pengembangan obyek wisata yakni Bank Indonesia (BI) dengan memberikan bantuan banana boat, material pembangunan jalan dan gazebo. Ketertarikan BI terlibat dalam pengembangan parawisata Malaha karena di Desa Malah memiliki kekhasan UMKM sebagai pendukung wisata seperti produser minuman coklat dan kripik pisang serta memiliki kelembagaan masyarakat seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Komitmen yang kuat juga ditujukan pemerintah desa Malaha dengan mengalokasikan anggaran pengembangan obyek wisata melalui dana desa melalui badan usaha milik desa (BUMdes). Kemudian komitmen masyarakat melalui keterlibatan mereka dalam pembangunan sarana dan prasarana obyek wisata seperti pembangunan jalan, gazebo, swafoto, toilet, menjaga kebersihan serta penyediaan perahu untuk wisatawan. Komitmen berkolaborasi dalam pembagian peran dan tanggungjawab ini menyebabkan ruang partisipasi masyarakat dalam menentukan keberhasilan pembangunan obyek wisata menjadi terbuka, karena pemerintah tidak lagi memiliki wewenang tunggal dalam menentukan program-program pembangunan. Pemerintah menyadari bahwa pengembangan obyek wisata dapat diselesaikan dengan mudah apabila bekerjasama dengan masyarakat untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi.

### d. **Pemahaman Bersama (*Shared Understanding*)**

Pada tahap ini, stakeholder yang terlibat dalam kolaborasi harus membangun pemahaman bersama tentang visi, misi, tantangan yang dihadapi, peran, dan tujuan yang akan dicapai dalam kolaborasi. Pemahaman bersama memungkinkan semua pihak memiliki visi dan tujuan yang jelas. Ketika pihak yang berkolaborasi memahami apa yang ingin dicapai, hal ini dapat mengurangi kesalahpahaman dan konflik dalam menentukan tujuan dan sasaran.

Hasil penelitian ditemukan bahwa pemerintah dan masyarakat memiliki pemahaman dan pandangan yang sama untuk mengembangkan obyek wisata tanjung Malaha. Pemerintah dan

masyarakat memahami bahwa pengelolaan obyek wisata yang baik dan berkelanjutan akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal dan kemajuan pembangunan desa. Temuan lainnya, adanya pemahaman bersama ini meningkatkan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun kerjasama jangka panjang. Kemudian masyarakat termotivasi untuk berpartisipasi sebab masyarakat merasa ikut diberdayakan dalam pengembangan obyek wisata.

Adanya pemahaman bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan obyek wisata berdampak pada terbentuknya organisasi masyarakat peduli wisata atau kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Namun kelompok organisasi masyarakat ini kurang memberikan kontribusi dalam pengelolaan obyek wisata disebabkan anggota memiliki keterbatasan pemahaman dan perbedaan pandangan dalam pengelolaan obyek wisata, sehingga saat ini pengelolaan pariwisata dilakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berikut struktur anggota BUMDes Malaha sebagai berikut:

**Tabel 1. Struktur Anggota BUMDes Malaha**

No	Nama	Jabatan
1	Samsul Alam	Ketua
2.	Zulikar	Sekretaris
3.	Rosna	Bendahara
4.	Muh. Tahir	Anggota
5.	Rahmatang	Anggota

Sumber: Data Desa Malaha

#### e. Pencapaian Hasil (*Intermedite outcome*)

Dimensi ini terkait dengan hasil dari tujuan kolaborasi. Kolaborasi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya pengembangan dan dampak dari keberadaan obyek wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan aktor yang terlibat dalam kolaborasi pengembangan obyek wisata tanjung Malaha membawa dampak terhadap pembangunan obyek wisata. Kolaborasi memperkuat pemahaman pemerintah dan masyarakat tentang peran dan tanggungjawabnya dalam pengembangan obyek wisata. Hasil yang diperoleh dari kolaborasi adalah terbentuknya kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang memiliki tanggungjawab dalam menciptakan Sapta Pesona dikawasan pantai Malaha. Termasuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang sadar wisata. Tetapi karena tidak efektif dalam melaksanakan fungsinya maka pengelolaan obyek wisata dilakukan BUMDes.

Kolaborasi juga memberikan dampak terhadap meningkatnya jumlah pengunjung pada obyek wisata tanjung Malaha. Data yang diperoleh jumlah pengunjung tahun 2021 berjumlah 1.391 orang, tahun 2022 berjumlah 1.277 orang dan di tahun 2023 meningkat menjadi 1.450 pengunjung. Peningkatan jumlah pengunjung ini didukung ketersediaan fasilitas yang memadai, dan menawarkan keindahan pesisir pantai dengan pasirnya yang halus. Ditambah rindangnya pohon-pohon pinus yang tumbuh subur di kawasan tanjung ini. Kolaborasi juga berdampak pada tersedianya sarana dan prasarana seperti area parkir, kamar mandi umum, musholla, outbond, selfie area, gazeo, rumah warna-warni, tempat berjempur, spot foto dan kuliner lokal berupa minuman coklat dan keripik pisang. Bahkan, Desa Malaha saat ini sedang direncanakan untuk menjadi kawasan wisata yang memanfaatkan teknologi digital dalam membayar retribusi dan membayar layanan lain di kawasan wisata serta melakukan transaksi dengan UMKM pendukung pariwisata.

Meski demikian, dalam pengembangan obyek wisata ini masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi yakni penyusunan perencanaan pengembangan obyek wisata belum optimal karena kurangnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan musyawarah atau dialog yang dilakukan pemerintah dengan masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan obyek wisata.

### 3.2 Pembahasan

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan pembangunan. Pendekatan kolaboratif diperlukan untuk menciptakan sinergi dalam melaksanakan program-program pembangunan. Dalam konteks ini, kolaborasi melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, baik individu, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sektor swasta, serta lembaga-lembaga pemerintah. Menurut Evans (1996); Kreger (1990) menjelaskan model pembangunan dengan pendekatan pemerintah sebagai aktor tunggal telah terbukti menutup ruang-ruang inovasi dalam kebijakan pembangunan yang berakibat pada kegagalan pencapaian tujuan pembangunan (Fadli & Nurlukman, 2018).

Dalam kasus pengembangan obyek wisata tanjung Malaha, kolaborasi pemerintah dan masyarakat menghasilkan ide-ide baru atau solusi inovatif untuk memecahkan masalah. Karena itu, proses kolaborasi merupakan aspek penting yang harus diperhatikan. Indikator yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian ini adalah mengacu pada pandangan Ansell dan Gash (2007), yaitu:

#### a. Dialog Tatap Muka (*Face to Face Dialogue*)

Dialog tatap muka sangat penting dalam kolaborasi karena memungkinkan interaksi secara langsung yang dapat membantu mengurangi kesalahpahaman diantara stakeholder. Pertemuan tatap muka memberikan kesempatan bagi berbagai stakeholder untuk memberikan masukan dan pandangan yang dapat membantu memperjelas tanggungjawab dan komitmen pihak-pihak yang berkolaborasi. Secara umum, dialog tata muka dimaksudkan untuk meningkatkan komunikasi dan memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat dan meningkatkan partisipasi aktif dari pihak-pihak yang berkolaborasi.

Dalam membangun kolaborasi, mekanisme dialog memegang peran penting, karena pihak-pihak yang berkolaborasi akan mendapatkan informasi yang jelas program-program pembangunan. Hal ini sesuai pandangan Gunawan & Ma`ruf Farid, (2020) bahwa bahwa dialog tatap muka merupakan tahap awal yang sangat penting dalam sebuah kolaborasi. Tanpa dialog tatap muka di awal proses kolaborasi dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak dalam proses kolaborasi tersebut. Hal senada dikatakan Maharashtri et al., (2023) dialog tata muka merupakan suatu bentuk komunikasi yang penting dalam kolaborasi. Melalui komunikasi langsung, para pihak yang terlibat dalam kolaborasi akan lebih objektif ketika berinteraksi. Kunci dari dialog tata muka adalah bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam kolaborasi membangun komunikasi untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan hal tersebut, poin penting yang dicapai melalui dialog tatap muka dalam proses kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan obyek wisata tanjung Malaha adalah (1) adanya pemahaman yang jelas dan kesepakatan bersama terkait peran dan tanggungjawab masing-masing pihak. (2) pihak yang berkolaborasi akan mendapatkan informasi



yang jelas dan akurat terkait program pengembangan obyek wisata. (3) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan dampak dalam pengembangan obyek wisata, dan (3) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program-program pengembangan obyek wisata.

Dengan demikian, dialog tatap muka dalam pengembangan obyek wisata tanjung Malaha melalui musyawarah antara pemerintah dan masyarakat menjadi platform untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan membangun kesepakatan yang saling menguntungkan antara pihak yang berkolaborasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Maharashtri et al., (2023) bahwa dialog tatap muka dibutuhkan untuk membahas kepentingan bersama menuju tujuan yang sama. Bahkan menurut Sukrianto (2022) komunikasi yang bersifat dua arah sangat diperukan dalam memperkuat dan mencapai cita-cita sesuai tujuan organisasi.

#### **b. Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)**

Membangun kepercayaan dalam proses kolaboratif merupakan hal penting dalam mencapai tujuan bersama. Aspek penting yang menjadi perhatian dari dimensi ini adalah komunikasi, koordinasi dan kesepakatan bersama antar pemerintah dan masyarakat. Pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk terbuka pada masyarakat dalam setiap tindakan dan keputusannya. Informasi mengenai rencana kebijakan, program, dan anggaran termasuk alasan membangun kolaborasi dalam pengembangan obyek wisata tanjung Malaha disampaikan secara terbuka.

Komunikasi dan koordinasi sangat penting dalam kolaborasi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari konflik dan tumpang tindihnya peran dan tanggungjawab masing-masing pihak yang berkolaborasi. Karena itu, membangun kepercayaan dalam kolaborasi membutuhkan waktu yang cukup panjang dan konsistensi dari pihak yang terlibat. Hal ini sesuai pendapat Ansell dan Gash (2007) pembuat kebijakan atau pemangku kepentingan harus menyediakan waktu untuk membangun kepercayaan yang efektif. Jika pemangku kepentingan tidak dapat menganggarkan dana dan jadwal yang dibutuhkan, maka mereka sebaiknya tidak memulai strategi kolaborasi (Gunawan & Ma`ruf Farid, 2020).

Adanya kepercayaan diantara aktor, maka kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan obyek wisata tanjung Malaha dilakukan secara informal. Pembagian peran dan tanggungjawab hanya didasarkan pada kesepakatan bersama sehingga partisipasi dalam pengembangan obyek wisata sangat kurang dan bersifat jangka pendek karena disesuaikan dengan kemampuan pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, kondisi ini menunjukkan bahwa kolaborasi tidak selama dilakukan secara formal tetapi bisa dilakukan tidak resmi seperti yang disampaikan Thomson dan Perry (2006). Kolaborasi merupakan kegiatan dimana stakeholder yang mempunyai kekuasaan otonom saling bergerak dan berhubungan melalui proses negosiasi baik secara resmi maupun tidak, dengan menciptakan sebuah aturan dan struktur guna mengatur hubungan dan cara bertindak. (Mia Fairuza, 2017, Gunawan & Ma`ruf Farid, 2020).

Pemerintah dan menyadari menyadari bahwa keberhasilan kolaborasi sangat ditentukan saling kepercayaan masing-masing pihak sehingga mereka melahirkan konsensus bersama. Karena menurut Dorisman et al., (2021) jika antar stakeholder tidak mampu membangun kepercayaan maka proses kolaboratif tidak mungkin bisa dilakukan. Hal sama disampaikan Marshall (1995) bahwa kolaborasi merupakan proses mendasar dari bentuk kerja sama yang menghasilkan kepercayaan, integritas, dan berbagai terobosan melalui pencapaian konsensus, rasa memiliki, dan integrasi dalam semua aspek organisasi.

Berdasarkan hal tersebut, aspek komunikasi dan koordinasi merupakan faktor utama dalam membangun hubungan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan obyek wisata tanjung Malaha. Melalui komunikasi dan koordinasi tersebut, pembagian tugas dan tanggung jawab dapat diatur dengan jelas, sehingga mengurangi ketidakjelasan dan meningkatkan efisiensi kegiatan operasional. Semua pihak dapat bekerja untuk mencapai tujuan yang sama tanpa adanya konflik kepentingan. Namun, karena keterbatasan sumberdaya yang dimiliki masyarakat, pengalokasian sumberdaya seperti sumberdaya manusia dan anggaran belum maksimal.

### c. **Komitmen Bersama (*Commitmen to Process*)**

Komitmen bersama mencakup kesungguhan dan dukungan dari semua pihak yang terlibat untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Pihak-pihak yang terlibat dalam kolaborasi harus memiliki visi yang sama mengenai tujuan pengembangan obyek wisata. Karena menurut Dwiyanto (2011) kolaborasi merupakan proses penyatuan visi, tujuan, strategi dan kegiatan antar stakeholder, dimana masing-masing pihak berada pada posisi masing-masing namun memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan secara mandiri dan memiliki otoritas dalam mengelola organisasinya meskipun harus tunduk pada kesepakatan bersama (Khitam, 2022).

Visi tersebut harus memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. Karena itu komitmen bersama dalam pengembangan obyek wisata tanjung Malaha ditunjukkan pada komitmen pada peran dan tanggungjawab masing-masing pihak. Keseriusan tersebut juga terimplemtasi melalui pembentukan kelompok sadar wisata (Podarwis). Peran pemerintah selain menyiapkan anggaran juga menghadirkan investor salah satunya Bank Indonesia (BI) sementara komitmen masyarakat melalui keterlibatan mereka dalam menjaga fasilitas obyek wisata dan pembangunan sarana dan prasarana obyek wisata seperti pembangunan jalan, gazebo, swafoto, toilet, serta penyediaan perahu untuk wisatawan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dijelaskan bahwa pemerintah dan masyarakat memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan kesepakatan bersama terkait peran dan tanggungjawab masing-masing pihak. Komponen utama lainnya dari komitmen adalah visi dan misi, transparansi informasi, komunikasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengembangan obyek wisata. Hal ini sesuai dengan pandangan Khitam (2022) inti dalam kolaborasi adalah tetap menjunjung tinggi atas kesepakatan bersama meskipun setiap pihak yang tergabung dalam kolaborasi memiliki kepentingan yang akan dibawa menjadi sebuah keputusan dan masing-masing akan menawarkan alternatif solusi dari sebuah permasalahan yang dihadapi. Lebih lanjut Maharashtri et al., (2023) menjelaskan komitmen didasarkan pada hubungan saling percaya antar stakeholders dan terjalinnya komunikasi yang sangat baik dan intens.

### d. **Pemahaman Bersama (*Shared Understanding*)**

Pemahaman bersama dalam mengembangkan objek wisata merujuk pada kesepakatan dan persepsi yang sama antara semua pemangku kepentingan mengenai visi, tujuan, strategi, tanggung jawab, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk pengembangan dan memajukan objek wisata. Ansell & Gash (2008) menjelaskan pemahaman bersama digambarkan sebagai misi bersama, visi bersama, pemahaman bersama termasuk pemahaman bersama terhadap masalah (A. dan A. L. S. Sabaruddin, 2020).

Elemen penting dari tahap ini adalah adanya pemahaman bahwa pengelolaan parawisata yang baik dan berkelanjutan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Nunun (2018), pengembangan desa wisata diharapkan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat dalam mengembangkan perekonomian dan kesejahteraan desa. Beberapa dampak positif dari pengembangan ini antara lain: (1) menciptakan lapangan kerja yang dapat mengurangi tingkat pengangguran; (2) mendorong pertumbuhan ekonomi; (3) melestarikan alam, sumber daya, dan budaya setempat; serta (4) menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, dan lain-lain (Restiani & Susanto, 2023). Selanjutnya disampaikan Avilia et al (2022) bahwa pengembangan desa wisata selain mempercepat pembangunan untuk mendorong ekonomi desa juga transformasi sosial, dan budaya (Adnan, 2023).

Pemahaman bersama juga digambarkan adanya visi, misi dan tujuan bersama dalam mengembangkan obyek wisata tanjung Malaha yang berkelanjutan, berbudaya dan bermanfaat bagi semua pihak. Dalam rangka mengembangkan obyek wisata berkelanjutan, maka dibentuk kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Kehadiran Pokdarwis menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggungjawab dalam pengelolaan obyek wisata Tanjung Malaha secara berkelanjutan. Meskipun temuan lapangan Pokdarwis tidak berjalan karena anggota Pokdarwis memiliki keterbatasan sumberdaya manusia dan pemahaman pengelolaan obyek wisata sehingga terjadi perbedaan pandangan diantara anggota Pokdarwis. Untuk menggantikan tugas Pokdarwis maka pengelolaan obyek wisata dilakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Berdasarkan temuan tersebut menunjukkan program pembangunan yang berorientasi pada kesamaan visi dan misi cenderung lebih konsisten dalam pemanfaatan sumberdaya seperti anggaran, tenaga kerja, dan waktu serta semua pihak bekerja berdasarkan tujuan yang sama.

Karena itu, untuk mewujudkan pemahaman bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan obyek wisata diperlukan koordinasi yang baik untuk menghindari tumpang tindihnya peran dan tanggungjawab, tercapainya visi dan misi, serta mendorong partisipasi masyarakat. Hal ini sesuai penjelasan Lemmetyinen (2010) koordinasi penting bagi para pemangku kepentingan pariwisata pada suatu destinasi, karena mereka harus saling bekerjasama untuk mencapai tujuan. Lemmetyinen (2010), Domański dan Gwosdz (2010) menambahkan koordinasi merupakan sebuah kebutuhan mutlak di dalam industri pariwisata, karena para pemangku kepentingan mempunyai perbedaan fungsi dan kapasitas masing-masing di destinasi wisata (Yusuf & Sella, 2021).

#### **e. Pencapaian Hasil (*Intermedite Outcome*)**

Dimensi ini terkait dengan hasil yang dicapai dari proses kolaborasi. Kolaborasi yang efektif menghasilkan keputusan dan tindakan yang baik. Kolaborasi sering melahirkan gagasan dan inovasi terhadap masalah yang dihadapi. Gagasan yang dimaksudkan terkait pengembangan obyek wisata tanjung Malaha adalah keinginan bersama untuk melakukan perbaikan dan membenahan sarana dan prasarana obyek wisata. Hal ini sesuai yang disampaikan Zach (2016) menunjukkan bahwa kolaborasi dapat mendorong inovasi meski dalam sebuah organisasi berskala mikro.

Terkait hasil yang dicapai dalam kolaborasi pemerintah dan swasta dalam pengembangan obyek wisata tanjung Malaha adalah adanya kesepakatan bersama pemerintah dan masyarakat membentuk kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Tetapi karena, lembaga ini kurang optimal dalam melakukan pengelolaan obyek wisata karena kurangnya pemahaman anggota maka pengelolaan obyek wisata diserahkan ke lembaga badan usaha milik desa (BUMDes).

Kolaborasi ini juga berdampak pada ketersediaan fasilitas yang memadai untuk mendukung kenyamanan pengunjung.

Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi sangat dibutuhkan dalam mengatasi keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan pembangunan. Kolaborasi juga dapat meningkatkan inovasi, kreativitas, dan ide untuk menghasilkan solusi dalam memecahkan masalah yang tidak mungkin dilakukan secara sendiri-sendiri. Seperti yang disampaikan Baggio (2011a) kolaborasi dan kemitraan sangat dibutuhkan dalam pengembangan pariwisata (Islahuddin et al., 2022). Kemitraan dapat menciptakan lingkungan di mana semua pihak yang terlibat memperoleh manfaat dari adanya kerjasama. Manfaat ini bukan hanya pada aspek finansial atau fisik, tetapi juga mencakup penyebaran resiko sosial (Fatmawati, 2011; Indahsari et al., 2022 dalam Alpionita et al., 2023).

Meski demikian, dalam pengembangan obyek wisata ini masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi yakni penyusunan perencanaan pengembangan obyek wisata belum optimal karena kurangnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan musyawarah atau dialog yang dilakukan pemerintah dengan masyarakat. Sementara keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengembangan pariwisata merupakan hal yang penting. Menurut Rizkianto & Topowijono (2018) masyarakat merupakan salah satu pemangku kepentingan yang memiliki posisi dan peran penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan dan pengembangan pariwisata, dimulai dari kerangka perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan pariwisata (Laudina et al., 2021).

Kurangnya keterlibatan masyarakat ini disebabkan beberapa anggota masyarakat merasa mereka tidak memiliki pengetahuan atau keahlian yang cukup untuk memberikan kontribusi yang berarti dalam musyawarah. Kemudian kurangnya pemahaman masyarakat tentang bagaimana kegiatan tersebut akan meningkatkan kesejahteraan mereka. Padahal menurut Adnan (2023) seharusnya masyarakat berperan sebagai pelaku utama dalam mempromosikan pariwisata dan inovator dalam memberikan gagasan untuk pengembangan desa wisata. Bahkan menurut Gray (1989) yang dikutip Clarkson, (1995); Safti (2011) masyarakat dikategorikan sebagai stakeholder primer bersama-sama dengan organisasi pemerintah, organisasi pengelola destinasi, hotel, atraksi pariwisata, dan perusahaan transportasi dan merupakan stakeholder penting dalam keberlangsungan pelaksanaan kegiatan pariwisata (Mahrizi & Khalfan, 2021).

## 5. Kesimpulan

Proses kolaborasi dalam pengembangan obyek wisata tanjung Malaha di Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka belum terlaksana secara optimal. Salah satu aspek yang menjadi penghambat adalah kurangnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat belum berjalan baik sehingga pada kegiatan musyawarah atau dialog hanya sebagian masyarakat yang berpartisipasi. Kurangnya keterlibatan masyarakat ini disebabkan beberapa anggota masyarakat merasa mereka tidak memiliki pengetahuan atau keahlian yang cukup untuk memberikan kontribusi yang berarti dalam musyawarah. Kemudian kurangnya pemahaman masyarakat tentang bagaimana kegiatan tersebut akan meningkatkan kesejahteraan mereka. Sementara partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan obyek wisata sangat penting. Masyarakat sebaiknya berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, memberikan masukan, dan berkontribusi pada perencanaan, implementasi, dan evaluasi program-program obyek wisata. Kondisi ini berdampak pada perencanaan pengembangan obyek wisata yang berkelanjutan. Pemerintah dan masyarakat pada dasarnya

memiliki komitmen yang kuat dalam mengembangkan obyek wisata melalui tanggungjawab masing-masing aktor. Tetapi masyarakat memiliki keterbatasan sumber daya sehingga masyarakat berharap perlunya keterlibatan pihak swasta dalam kolaborasi, karena keterlibatan swasta dalam pengembangan obyek wisata Malah tidak melalui kerjasama formal tetapi hanya bersifat insidental.

## Daftar Pustaka

- Adnan, Z. (2023). Analisis Strategi Pengembangan Desa Wisata Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Garut. *Jurnal Publik*, 17(01), 76–86. <https://doi.org/10.52434/jp.v17i01.183>
- Alpionita, N., Azhari, A., & Zahari, A. F. M. (2023). Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kolaka Utara. *Jurnal Publik*, 17(02), 153–163. <https://doi.org/10.52434/jp.v17i02.291>
- Anisykurlillah, R. (2024). Kolaborasi Hexahelix dalam Pengembangan Ekonomi Digital Kreatif di Kota Malang. *JPAP (Jurnal Penelitian Administrasi Publik)*, 9(2), 187–200. <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/jpap.v9i2.82.28>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Dorisman, A., Suradji, A., & Setiawan, R. (2021). *Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas*. 19(1).
- Fadli, Y., & Nurlukman, A. D. (2018). Government Collaboration in Empowerment? A Collaborative Framework for the Government in Empowering Coastal Communities. *Journal of Government and Civil Society*, 2(2), 145. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v2i2.1022>
- Gunawan, A., & Ma`ruf Farid, M. (2020). Collaborative Governance Dalam Upaya Merespon Pengaduan Masyarakat Terkait Lalu Lintas (Studi Pada Radio Suara Surabaya Dan Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya). *Jurnal of Public Sector Innovation*, 1–10. [https://library.unismuh.ac.id/uploaded\\_files/temporary/DigitalCollection/ZmQ4NGZiNjBkN2NiOTdjYjBkM2U2MTdiNzkxNzcxM2QxY2FhNTVIMQ==.pdf](https://library.unismuh.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ZmQ4NGZiNjBkN2NiOTdjYjBkM2U2MTdiNzkxNzcxM2QxY2FhNTVIMQ==.pdf)
- Hermansyah, Abdul Haris, A. (2020). *Model Kolaborasi Dalam Pengembangan Parawisata di Kabupaten Sinjai*. 10, 133–145.
- Islahuddin, Eppang, B., Salim, M. A., Darmayasa, & Masatip, A. (2022). *Inovasi, Adaptasi, dan Kolaborasi: Pengembangan Wista Bahari Berbasis Inovasi, Adaptasi, dan Kolaborasi di Destinasi Super Prioritas Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19*. <http://repository.poltekparmakassar.ac.id/462/1/Book - Adaptasi Inovasi dan Kolaborasi.pdf>
- Khitam, M. C. (2022). Kolaborasi Quadruple Helix: Pengembangan Eduwisata Semaggot (Sekaran Edukasi Maggot) berbasis potensi Desa. *Jejaring Administrasi Publik*, 14(1), 93–102. <https://doi.org/10.20473/jap.v14i1.41885>
- Khopifatu S, I., Myrna, R., & Candradewini, C. (2023). Kolaborasi Dalam Pengelolaan Wana Wisata Gunung Galunggung Di Kabupaten Tasikmalaya. *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 14(2), 613. <https://doi.org/10.24198/jane.v14i2.45116>
- Laudina, N., Yuniarti, E., & Pratiwi, N. N. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Rajati Flower Garden Di Kabupaten Kuburaya. *JeLAST: Jurnal PWK, Laut, Sipil, Tambang*, 8(1), 1–9.
- Lestari Dewi, S. (2022). Koordinasi Program Perlindungan Anak Pada Masa Pandemi Di Kabupaten Garut. *Jurnal Publik*, 16(02), 46–57. <https://doi.org/10.52434/jp.v16i02.127>

- Maharashtri, S., Marom, A., & Herbasuki, H. (2023). Proses Collaborative Governance Dalam Layanan Aspirasi Dan Penanganan Aduan Kanal Sapa Mbak Ita Di Kota Semarang. *Jurnal Tinjauan Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 12(2)(July), 1–23. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/download/38485/28907>
- Mahrizi, A., & Khalfan, A. S. (2021). *The role of stakeholder participation in tourism planning in Oman. March.* [http://theses.ncl.ac.uk/jspui/handle/10443/5385%0Ahttps://theses.ncl.ac.uk/jspui/bitstream/10443/5385/1/Al Mahrizi A S K 2021.pdf](http://theses.ncl.ac.uk/jspui/handle/10443/5385%0Ahttps://theses.ncl.ac.uk/jspui/bitstream/10443/5385/1/Al%20Mahrizi%20A%20S%20K%202021.pdf)
- Miles, Matthew B.; Huberman, A. Michael; Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. Third Edition.*
- Pujiyono, B. (2022). Kolaborasi multi aktor dalam pengelolaan wisata geo park belitung. 12, 95–104. <https://doi.org/https://doi.org/10.33366/rfr.v%vi%i.3367>
- Restiani, R., & Susanto, H. H. (2023). Optimalisasi Desa Wisata dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Maguwan Sambit. *Journal of Community Development and Disaster Management*, 5(1), 7–16. <https://doi.org/10.37680/jcd.v5i1.2884>
- Sabaruddin, A. dan A. L. S. (2020). *Collaborative Governance: Pendekatan Pelayanan Publik.* PT Pena Persada.
- Sabaruddin, A., Maulid, M., Fait, T., & Maharani, M. (2023). Analisis Stakeholder dalam Pengembangan Wisata Alam Kea-Kea Mangolo di Kabupaten Kolaka. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2), 171–178. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v6i2.3442>
- Sabaruddin, D. S. A. (2017). The Collaborative Management Model on Developing the Infrastructure of the Pomalaa's Airport, Indonesia. *ILIRIA International Review*, 7(1). <https://doi.org/10.21113/iir.v7i1.296>
- Stout, M., & Keast, R. (2019). 1. *Collaboration : what does it really mean ?* 17–35.
- Sukrianto, S. (2022). Model Interaksi Kepala Desa Dan Aparat di Desa Mustika Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. *Jurnal Publik*, 16(01), 38–45. <https://doi.org/10.52434/jp.v16i01.101>
- Triana wahyudi, Y. (2021). Proses Pemberdayaan Masyarakat Dalam Merintis Desa Wisata Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut. *Jurnal Publik*, 15(1), 55–60. <https://doi.org/10.52434/jp.v15i1.175>
- Yeli Amelia Angelina, & Adianto Adianto. (2023). Kolaborasi Dalam Implementasi Program Pengembangan Destinasi Pariwisata (Studi Kasus Wisata Danau Rusa Di Kabupaten Kampar). *Jurnal Media Administrasi*, 7(2), 26–33. <https://doi.org/10.56444/jma.v7i2.452>
- Yusuf, M., & Sella, K. (2021). Identifikasi Peran dan Koordinasi Pemangku Kepentingan Terhadap Pengembangan Sarana dan Prasarana di Atraksi Wisata Menara Siger, Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Pariwisata Terapan*, 4(2), 130. <https://doi.org/10.22146/jpt.60439>